

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

- Tahun Sidang : 2021-2022  
Masa Persidangan : II  
Rapat ke- : 4  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Senin, 8 November 2021  
Waktu : 13.15 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta  
Acara : Membahas:  
1. Rencana Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022;  
dan  
2. Isu-isu Aktual.  
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)  
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)  
Hadir : A. 40 Anggota dari 52 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:  
1. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. (Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);  
2. Dr. Muhammad Yusuf. S.H., M.M. (Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);  
3. Dr. Ir. Muhammad Zaini Hanafi, M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan) secara virtual;  
4. Dr. TB Haeru Rahayu (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan);  
5. Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc. (Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan);  
6. Ir. Artati Widiarti, M.A. (Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);  
7. Laksma TNI Adin Nurawaluddin, M.Han. (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);

8. Dr. Ir. Rina, M.Si. (Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan); dan
9. Dr. Kusdiantoro, M.Sc. (Plt. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan).

## I. PENDAHULUAN

RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, membahas Rencana Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan Isu-isu Aktual, dibuka pukul 13.15 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-909/MK.02/2021 tanggal 4 Oktober 2021 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022, dimana Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan Alokasi Anggaran Tahun 2022 sebesar **Rp6.115.967.397.000,00** (enam triliun seratus lima belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, sebesar Rp2.150.999.920.000,00 (dua triliun seratus lima puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - b. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, sebesar Rp172.898.844.000,00 (seratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
  - c. Program Kualitas Lingkungan Hidup, sebesar Rp83.633.503.000,00 (delapan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah);
  - d. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, sebesar Rp273.074.994.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - e. Program Riset dan Iptek, sebesar Rp26.735.000.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah); dan
  - f. Program Dukungan Manajemen, sebesar Rp3.408.625.135.000,00 (tiga triliun empat ratus delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengevaluasi, mengkaji, dan melakukan pendekatan secara masif terkait adanya aspirasi nelayan kecil serta pelaku usaha kapal perikanan pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, guna menciptakan iklim usaha yang kondusif.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan sosialisasi secara masif di seluruh wilayah-wilayah pesisir Indonesia terkait Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk revisinya.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pengecekan hasil usulan dari aspirasi masyarakat Tahun 2021 agar bantuan yang sudah diusulkan dapat segera direalisasikan. Selanjutnya usulan tersebut dari aspirasi masyarakat yang belum diterima oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan agar segera disampaikan selambat-lambatnya tanggal 15 November 2021.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB.

Sekretaris Jenderal  
Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Ttd.

**Antam Novambar**

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Sudin, S.E.**  
A-151